

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ibu Kota Negara memiliki arti penting bagi sebuah negara, selain menjadi pusat pemerintahan juga menjadi pusat bisnis dan perekonomian negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang sah, memiliki Ibu Kota yakni Jakarta. Ibu Kota Jakarta secara de jure baru diresmikan pada tahun 1961. Hal ini termaktup dalam Perpres atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 yang kemudian diperkuat lagi status Ibu Kota Jakarta lewat UU Nomor 10 Tahun 1964. (Wirachmi, 2022)

Dengan diproklamirkannya Jakarta sebagai Ibu Kota, kegiatan kenegaraan dan pemerintahan seluruhnya berpusat di Ibu Kota. Mayoritas Kementerian dan berbagai institusi besar lainnya berlokasi di Jakarta. Sementara itu Ibu kota Jakarta merupakan pusat bisnis dan perekonomian di Indonesia dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar yang berpusat dan tersebar di wilayah Jakarta, termasuk diantaranya perusahaan kelas dunia seperti Honda, Nestle, United Tractors, Barito Pasific dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Pada Bulan Agustus Tahun 2019, Joko Widodo selaku Presiden Negara Republik Indonesia dalam pidatonya menyatakan akan melakukan pemindahan Ibu Kota, sekaligus meminta izin kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Mengutip Haryanti (2019) berikut adalah pernyataan pemindahan Ibu Kota Negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada pidatonya.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Kepindahan Ibu Kota Negara ini merupakan sebuah gebrakan besar bagi pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi. Seperti yang kita

ketahui pembangunan pada masa pemerintahan Jokowi memang massive terjadi, utamanya dalam sektor infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara dan beberapa bangunan lain.

Upaya pemindahan Ibu Kota Negara ini, selain menyedot dana anggaran yang tidak sedikit juga merupakan proyek besar dengan tantangan yang besar. Presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi tentunya harus mengukur dari berbagai aspek mengenai pemindahan ini termasuk diantaranya pemilihan lokasi Ibu Kota Negara baru nantinya. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa nantinya lokasi yang dipilih untuk menjadi pusat pemerintahan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Karta negara, Kalimantan Timur.

Hal inipun disambut dengan pernyataan dari Bambang Brodjonegoro yang menjabat sebagai Kepala Bappenas, beliau mengatakan bahwa proses perpindahan akan dimulai pada tahun 2022 dan paling lambat pada tahun 2024, pusat pemerintahan Indonesia sudah berpindah ke Kalimantan. Bambang juga menambahkan bahwa Ibu Kota sebelumnya yakni Jakarta, akan tetap berjalan sebagai pusat bisnis dan keuangan yang skalanya internasional. (Intan, 2019)

Dalam konferensi persnya di Istana Negara, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara kurang lebih mencapai 466 Triliun Rupiah. Dana yang akan digunakan untuk melakukan perpindahan ini bersumber dari APBN, dengan presentase sebesar 19% dan sisanya dana diharapkan datang dari KPBU, investasi langsung swasta dan BUMN.

Pemindahan Ibu Kota merupakan wacana yang sudah ada sejak era presiden sebelum Joko Widodo, bahkan sudah dideklarasikan sejak masa Pemerintahan Soekarno. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Joko Widodo dalam rapat terbatas, Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan gagasan baru, dan bahkan muncul dalam setiap era pergantian Presiden Indonesia.

Dari pernyataan yang disampaikan Joko Widodo ini mengartikan bahwa, proyek pemindahan Ibu Kota adalah ide yang sudah lama ada di benak para pemimpin Indonesia dan ingin segera direalisasikan. Namun, dalam hal ini eksekusi proyek dan wacana tersebut dapat terealisasi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Melihat kebelakang, Presiden-Presiden yang memimpin Indonesia memiliki ceritanya tersendiri mengenai misi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Misalnya seperti Presiden Soekarno, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. (Yahya, 2018)

Presiden Soekarno misalnya, memiliki wacana pemindahan Ibu Kota Negara yang idenya dicetuskan medio 1950-an. Soekarno pada saat itu melihat Kalimantan tengah sebagai opsi yang cukup baik untuk dijadikan Ibu Kota Negara, hal ini dibuktikan dengan proses peletakan batu pertama yang sudah mulai dilakukan. Sudah dua kali disebutkan bahwa Soekarno telah mengunjungi Palangkaraya, sekaligus melihat bagaimana potensi yang dimiliki Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru.

Wacana pemindahan selanjutnya dilakukan oleh Presiden Soeharto, melalui Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri yang kemudian di orientasikan sebagai Ibu Kota baru. (Matanasi, 2022)

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie juga berniat ingin memindahkan Ibu Kota Negara. Berbeda dengan dua pendahulunya, Habibie lebih memilih Sidrap, Sulawesi Selatan sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Habibie berasumsi bahwa Sidrap berada di tengah-tengah Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono juga mencanangkan kembali pemindahan Ibu Kota Negara, tepatnya di Kabupaten Banyumas, Purwokerto. (Hutasoit, 2018)

Dapat dilihat dari sini bahwa upaya untuk melakukan pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan bahkan sejak Presiden Soekarno, dan diikuti oleh beberapa pendahulu Presiden Jokowi tentunya. Namun perlu untuk diketahui, bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya terjadi di Indonesia.

Selain di Indonesia, nyatanya perpindahan Ibu Kota juga pernah dilakukan oleh beberapa negara. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara yang pernah melakukan perpindahan Ibu Kota. Negara-negara seperti India, Nigeria, Myanmar dan Brasil juga pernah melakukan perpindahan Ibu Kota yang terjadi di negara mereka.

Seperti India misalnya, sebelum tahun 1931 India memiliki Ibu Kota Negara yang terdapat di Kolkata. Perpindahan ini memang terjadi karena dilatar belakangi faktor politik, dimana pada masa itu India masih belum merdeka dan pemerintahan berada di tangan Inggris. Inggris menganggap bahwa tidak menyulitkan bagi mereka mengendalikan India jika Ibu Kota dipindahkan ke New Delhi. (Hodawya, 2019)

Pemindahan Ibu Kota juga terjadi dinegara-negara Afrika, salah satunya adalah Nigeria. Nigeria telah lama menjadikan Lagos sebagai Ibu Kota mereka, sejak tahun 1914. Namun pada tahun 1976, Presiden Nigeria saat itu yakni Murtala R. Muhammed mengumumkan bahwa Nigeria memiliki Ibu Kota baru yang berlokasi di Abuja. (Nurhadi, 2022)

Myanmar juga termasuk negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya, perpindahan Ibu Kota di Myanmar ini tergolong kasus baru karena terjadi pada tahun 2001. Namun memang secara resmi Myanmar memindahkan Ibu Kotanya dari Yangon ke Naypyidaw adalah pada tahun 2005, karena menunggu proses pembangunan selesai.

Selanjutnya, negara pertama di Amerika Latin yang melakukan perpindahan Ibu Kota adalah Brasil. Brasil memang sejak lama menjadikan Rio de Janeiro sebagai Ibu Kota mereka, tepatnya dari tahun 1763. Namun pada tahun 1960, tepatnya saat masa kepemimpinan Presiden Juscelino Kubitschek de Oliveira, perpindahan Ibu Kota terjadi di Brasil. Dari yang sebelumnya berada di Rio de Janeiro berpindah ke Brasilia. (Adryamarthanino, 2022)

Walaupun sudah dilakukan diberbagai negara, pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang mudah. Pemindahan ini akan mencetuskan

berbagai perdebatan, mulai dari yang pro hingga kontra. Mulai dari yang mendukung hingga mencela tindakan pemindahan Ibu Kota Negara ini.

Mantan Menteri PPN/Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago, dalam wawancaranya bersama CNBC Indonesia mengatakan bahwa memang perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur didasari oleh adanya pemusatan tunggal di Pulau Jawa. Andrinof Chaniago menilai bahwa sejak zaman kolonial dahulu, pemerintah sudah menjadikan pulau Jawa sebagai satu-satunya pusat pembangunan dan juga magnet tunggal dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Anam, 2022)

Sementara itu alasan lain pemindahan Ibu Kota Negara menurut Yahya (2018) adalah permasalahan geografis yang tidak ada habisnya bagi Jakarta. Banjir yang tak kunjung ditemukan solusinya, yang bahkan sudah meliputi hampir seluruh wilayah. Selain banjir, Jakarta juga dinobatkan sebagai kota didunia yang paling cepat tenggelam, dan tentunya hal ini juga yang dijadikan concern pemindahan Ibu Kota Negara.

Selain berbagai permasalahan geografis, Jakarta juga mengambil dua peranan sekaligus yakni menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan. Tentunya hal ini akan menyebabkan konsekuensi diberbagai sektor, utamanya adalah permasalahan tata kelola kota yang kurang baik.

Menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan, menyebabkan Jakarta kelebihan jumlah penduduk, dan hal ini menyebabkan permasalahan lainnya seperti ketimpangan sosial yang tinggi hingga kemacetan yang sulit terurai. (Hutasoit, 2018)

Sementara itu permasalahan lainnya adalah dari segi ekonomi. APBN Indonesia berputar hanya di Jakarta dan sekitarnya saja. Fakta perputaran ini juga menjadi salah satu concern pemindahan Ibu Kota Negara, karena didasari oleh data yang ada 70% ekonomi Indonesia digerakan oleh dana APBN. Jika dana APBN untuk perputaran ekonomi tersebut hanya mengalir di Jakarta saja perputarannya. Maka akan terjadi ketidak seimbangan perputaran ekonomi, dan solusi terbaik adalah melakukan pemindahan Ibu Kota. Karena dengan berpindahnya Ibu Kota,

perputaran ekonomi Indonesia tidak hanya terjadi di Jakarta saja. (Hutasoit, 2018)

Selain pro, tentunya ada pula kontra yang terjadi dalam wacana pemindahan Ibu Kota Negara. Wacana pemindahan Ibu Kota ini terjadi saat Indonesia dalam keadaan yang masih sulit, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hafidz Tohir, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, jadi menurutnya tidak perlu dulu dilakukan pemindahan Ibu Kota yang akan menyarap banyak dana APBN. (Pratomo, 2019)

Selain itu banyak juga kalangan yang berpendapat menentang adanya proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini. Alasannya adalah karena perubahan yang luar biasa, akan memberikan dampak yang luar biasa pula. Termasuk ke dalam perubahan tatanan negara, dan yang lebih ditakutkan Indonesia akan menjadi negara serikat seperti Singapura. (Yahya, 2018)

Sementara itu pendapat lain datang dari Associate Professor NTU Singapore, Prof. Sulfikar Amin. Sulfikar merasa bahwa alasan pemindahan Ibu Kota Negara karena banjir, kurang tepat. Ia menilai bahwa bencana banjir yang tak kunjung memiliki solusi karena adanya permasalahan tata kota. Sehingga pemindahan Ibu Kota Negara tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di DKI Jakarta. (Anam, 2022)

Bahkan setelah munculnya UU IKN penolakan yang cukup keras terus terjadi, kali ini berasal dari koalisi masyarakat Kaltim. Koalisi masyarakat Kaltim menilai bahwa, jika diteruskan proyek pemindahan ini akan berdampak kepada satwa-satwa langka yang berada di sekitar proyek. Selain terancamnya kehidupan satwa langka, proyek pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menggusur lahan-lahan masyarakat adat, utamanya masyarakat adat suku balik dan suku paser. (Daton, 2022)

Penolakan ini nyatanya tercetus bukan dari masyarakat Kalimantan saja, namun juga mayoritas masyarakat Indonesia. 61,9% masyarakat Indonesia menolak pemindahan Ibu Kota. Banyak juga pengguna sosial media yang turut menyuarakan penolakan, seperti komentar negatif dan

pesimis yang dikeluarkan setiap kali ada berita mengenai IKN. (Pahlevi, 2021)

Permasalahan penolakan yang datang dari SDM, akan menjadi salah satu permasalahan besar bagi pemerintah. Permasalahan lain seperti pengundulan hutan yang diakibatkan oleh pembangunan IKN, masih bisa diatasi. Karena nantinya IKN dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan tetap akan mempertahankan kelestarian lingkungan. Begitupula dengan banjir dan permasalahan Jakarta lainnya, seperti yang disebutkan oleh Prof. Sulfikar Amir bahwa hal itu tidak relevan jika penyelesaiannya dengan memindahkan Ibu Kota.

Dari sini dapat kita lihat bahwa, penolakan dari SDM sebenarnya menjadi faktor sandungan pemindahan Ibu Kota Negara, karena pemerintah bisa saja memindahkan barang atau benda, namun pemerintah tidak bisa memindahkan manusia begitu saja.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu kawasan dan wilayah. Bahkan disampaikan oleh anggota Pansus RUU IKN yakni Budisatrio Djiwandono, kesiapan SDM merupakan kunci keberhasilan tata kelola Ibu Kota Nusantara. Karena nantinya, pembangunan dan pertumbuhan IKN kedepan berada ditangan sumber daya manusianya.

Menariknya lagi SDM yang enggan pindah ke Ibu Kota Negara baru, tidak hanya berasal dari kalangan rakyat biasa. ASN atau Aparatur Sipil Negara nyatanya juga menolak untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara baru, bahkan penolakan ini mencapai 94,7 persen. (Ryandi, 2019)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. Konsekuensi penyelenggaraan negara adalah perpindahan sumber daya manusia didalamnya, salah satunya adalah ASN. Permasalahan yang akan dihadapi oleh pemerintah sekarang adalah jika ASN tidak ingin pindah, maka pemerintah akan kekurangan SDM untuk membangun IKN. ASN yang bertugas mengabdikan diri pada negara tentunya menjadi ujung tombak pertama proses pemindahan Ibu Kota,

bahkan pemerintah sudah menyiapkan 4 skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara. (Nugraheny, 2022)

Jika penolakan ASN untuk pindah masih terus berlanjut, ancaman besar yang menanti adalah para ASN yang akan didelegasikan ke IKN mundur atau *resign*. Pemerintah juga akan terancam kehilangan ASN yang mumpuni dalam bidangnya. Tentunya ini menjadi permasalahan yang pelik bagi pemerintah, karena ASN yang memiliki kemampuan mumpuni akan lebih memilih tinggal menetap di Jakarta, mencari pekerjaan lain dan tetap tinggal bersama keluarganya daripada harus hidup berjauhan.

Pemerintah tentunya akan memilih ASN terbaik dengan kemampuan yang mumpuni untuk dipindahkan. Namun jika mereka menolak dan bahkan mengundurkan diri, hal ini yang kemudian menjadi permasalahan. Karena jika ASN tersebut mengundurkan diri, maka formasi ASN yang dipindah akan melemah dari segi kemampuan. Tentunya ini akan memberikan efek jangka panjang bagi pembangunan IKN, atau bahkan menghambat realisasi proyek ini.

Menarik memang melihat bagaimana penolakan ini datang dari ASN, karena seharusnya ASN menjadi sumber daya manusia yang paling mematuhi aturan pemerintah. Namun dalam fenomena ini, justru mayoritas ASN yang menolak pemindahan ke IKN. Dalam upaya pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah telah mencoba mengkomunikasikannya mulai dari cara eksternal maupun internal. Dapat dilihat dari berbagai media massa, pemerintah sudah melakukan cara-cara eksternal untuk mengkomunikasikan upaya pemindahan ini. Mulai dari pemberitaan mengenai fasilitasi, dan juga insentif tambahan yang akan didapatkan oleh ASN yang mau pindah ke IKN. (Wikanto, 2022)

Dari sisi internal, pemerintah juga harus mengkomunikasikan pemindahan ini dengan cara yang bijak. Melansir AntaraneWS, Ketua Bakohumas Dirjen Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan bahwa komunikasi internal sangat penting. Usman menambahkan bahwa pemerintah bisa menggunakan teknik-teknik

persuasif melalui media massa dan konten kreatif seperti infografis, virtual tour dan lain-lain. (Wisnubroto, 2022)

Permasalahan mengenai pemindahan ASN ke IKN ini juga menjadi permasalahan SDM yang pelik. Namun dari sini kita bisa melihat bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan ini, melalui komunikasi politik yang dilakukan. Pemerintah selaku komunikator dalam hal ini tentunya harus dengan jeli mengkomunikasikan rencana pemindahan ini, agar permasalahan penolakan ASN ini dapat teratasi.

Penelitian ini utamanya akan melihat bagaimana komunikasi politik yang dilakukan pemerintah, agar rencana pemindahan ini dapat diterima oleh berbagai elemen khususnya dalam kasus ini adalah ASN. Terlebih dalam kasus ini, penolakan ASN untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara baru, akan menghasilkan dampak yang besar. Dampak tersebut tentu adalah tidak dapat terealisasinya proyek besar pemerintah ini.

Dari uraian diatas penelitian ini akan mengambil judul **“Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana komunikasi politik pemerintah dalam upaya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN)

1.3. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah atau fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana komunikasi politik pemerintah dalam kepindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat komunikasi politik pemerintah dalam upaya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN)

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi bagi masyarakat luas dan juga bagi mahasiswa, dalam rangka mengetahui pemahaman mengenai bagaimana komunikasi politik pemerintah dalam upaya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN).

1.5.2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana komunikasi politik pemerintah dalam upaya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN).

